



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/3823 /M.PAN-RB/10/2014
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi tahun 2014
pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir

14 Oktober 2014

Yth. **Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir**

di

Tempat

Sesuai dengan Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, serta Peraturan Menteri PAN dan RB No 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, Tim Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir dengan hasil penilaian 56,09 (CC). Hasil evaluasi yang lebih rinci disampaikan dalam Laporan Hasil Evaluasi yang kami lampirkan bersamaan dengan surat ini.

Laporan Hasil Evaluasi tersebut merangkum upaya dan program pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah dijalankan di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, beserta dengan rekomendasi (*area of improvement*) yang perlu dilakukan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, baik di 8 (delapan) area perubahan (komponen pengungkit) maupun di sasaran Reformasi Birokrasi Nasional (komponen hasil).

Kami mengharapkan agar Saudara dapat menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan, dan terus mengembangkan upaya-upaya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, disampaikan terima kasih.



Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
selaku Ketua Tim RBN,

Azwar Abubakar

Tembusan:

Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323
SITUS [http : //www.menpan.go.id](http://www.menpan.go.id)

Nomor : B/3494/WMPANRB-UPRBN/9/2014
Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi

Jakarta, 22 September 2014

Yth. **Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir**
di
Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten).

Evaluasi ini bertujuan untuk menilai kemajuan dan memberi saran perbaikan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka **meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik** di lingkungan Bapeten. Simpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi Bapeten adalah **56,09** dengan kategori "**CC**" dengan rincian:

No	Komponen Penilaian	Nilai Maksimal	Nilai Capaian	% Capaian
A.	Pengungkit			
1.	Manajemen Perubahan	5,00	3,30	66,00%
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	3,13	62,60%
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	2,33	38,83%
4.	Penataan Tatalaksana	5,00	3,60	72,00%
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	11,70	78,00%
6.	Penguatan Akuntabilitas	6,00	1,65	27,50%
7.	Penguatan Pengawasan	12,00	4,48	37,33%
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	3,48	58,00%
	Sub Total Komponen Pengungkit	60,00	33,67	56,12%

No	Komponen Penilaian	Nilai Maksimal	Nilai Capaian	% Capaian
B.	Hasil			
1.	Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20,00	12,82	64,10%
2.	Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas KKN	10,00	3,00	30,00%
3.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	6,60	66,00%
	Sub Total Komponen Hasil	40,00	22,42	56,05%
	Indeks Reformasi Birokrasi	100,00	56,09	56,09%

2. Berbagai upaya telah dilakukan demi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Bapeten, sesuai dengan hasil penilaian di atas terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mencapai sasaran reformasi birokrasi:

a. Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi.

Nilai akuntabilitas kinerja Bapeten adalah 65,56 (B) yang berarti pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan Bapeten sudah baik. Hampir seluruh pimpinan di lingkungan Bapeten sudah terlibat dalam penguatan akuntabilitas, terutama saat penyusunan Renstra, penyusunan Penetapan Kinerja, dan pemantauan pencapaian kinerja secara berkala. Nilai survei kapasitas organisasi dengan hasil 3,03 (skala 5). Adapun hal penting yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi (*area for improvement*) di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir adalah:

- 1) Melibatkan seluruh jajaran pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- 2) Melakukan analisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada seluruh unit kerja;
- 3) Menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi dengan mengajukan perubahan organisasi;
- 4) Melakukan analisis efisiensi dan efektivitas atas implementasi peta proses bisnis dan SOP tersebut;
- 5) Menyusun rencana redistribusi pegawai. Perencanaan kebutuhan pegawai harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi;
- 6) Melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi dan yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya kepada seluruh pegawai, kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pencapaian kinerja individu dan menjadikan capaian kinerja individu tersebut sebagai dasar untuk pemberian tunjangan kinerja;
- 7) Menerapkan pemberian sanksi dan imbalan (*reward*) kepada seluruh unit organisasi, sebagai wujud penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai perlu.

b. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN.

Pencapaian sasaran pemerintah yang bersih dan bebas KKN di lingkungan Bapeten belum tercapai dengan baik, hal ini disebabkan oleh program-program RB terkait pengawasan yang belum sepenuhnya dilaksanakan sehingga belum terlihat perubahan-perubahan yang signifikan walaupun telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Hal yang perlu dilakukan dalam rangka menciptakan pemerintah yang bersih dan bebas KKN (*area for improvement*) di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir adalah:

- 1) Menerapkan pengendalian gratifikasi dan penanganan benturan kepentingan;
- 2) Menerapkan aktivitas pengendalian dan penilaian risiko pada seluruh unit organisasi;
- 3) Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat;
- 4) Menerapkan *Whistle Blowing System* (WBS) untuk seluruh unit organisasi;
- 5) Melakukan pembangunan zona integritas secara intensif yang dilanjutkan dengan menetapkan unit kerja menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan publik di lingkungan Bapeten sudah cukup baik. Dari hasil survei eksternal kualitas pelayanan, indeks kepuasan masyarakat tahun 2014 menunjukkan angka 2,64 (skala 4). Hal penting yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik (*area for improvement*) di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir adalah:

- 1) Melakukan reviu dan perbaikan atas pelaksanaan standar dan SOP secara berkala;
- 2) Menerapkan budaya pelayanan prima, dengan cara melakukan pelayanan secara terpadu, menerapkan sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan, serta memberikan kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar;
- 3) Membuka akses hasil survei kepuasan masyarakat serta melakukan tindaklanjut terhadap hasil survei tersebut.

Demikian laporan hasil evaluasi atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Bapeten. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Bapeten. Selanjutnya Kami harapkan agar Saudara dapat meningkatkan upaya-upaya pelaksanaan reformasi birokrasi di Instansi Saudara secara berkelanjutan.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

**Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi**

Selaku Ketua Unit Pengelola Reformasi Birokrasi



Tembusan:

1. Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional;
2. Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
3. Ketua Tim Independen;
4. Ketua Tim *Quality Assurance*.